

ABSTRAK

Istifadatul Hasanah, 21382072029, “*Relevansi Konsep Negara dan Pemerintahan Indonesia Perspektif Al-Mawardi dan Ali Abdur Raziq*”, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Ach. Faidi, LL.M, MA.

Kata Kunci: Negara dan pemerintahan, Indonesia, Al-Mawardi, Ali Abdur Raziq.

Meskipun merupakan negara dengan mayoritas Muslim, Indonesia tidak lantas mengatasnamakan dirinya sebagai negara Islam. Akan tetapi, dewasa ini muncul beberapa kelompok yang kembali mengusung konsep *Khilafah* untuk menggantikan dasar negara. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis relevansi konsep negara dan pemerintahan dari perspektif dua pemikir Islam berpengaruh, yaitu Al-Mawardi dan Ali Abdur Raziq terhadap konsep negara dan pemerintahan Indonesia yang unik dengan segala kompleksitas didalamnya.

Ada 3 pokok rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana konsep negara dan pemerintahan Indonesia? Bagaimana konsep negara dan pemerintahan perspektif Al-Mawardi dan Ali Abdur Raziq? Dan bagaimana relevansi konsep Al-Mawardi dan Ali Abdur Raziq dengan konsep negara dan pemerintahan Indonesia?.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan antara lain *Conceptual Approach* dan *Comparative Approach*.

Hasil yang diperoleh adalah Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam Indonesia bukan merupakan negara agama seperti dalam konsep Al-Mawardi, namun juga tidak lantas memisahkan agama dari negaranya seperti dalam konsep Ali Abdur Raziq. Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik, dengan Pancasila sebagai dasar negaranya yang mengakomodasi prinsip religiusitas tanpa mengikat diri pada dogma agama tertentu dan mengintegrasikan nilai-nilai universal dengan kearifan lokal. Konsep negara dan pemerintahan yang dikemukakan oleh Al-Mawardi dan Ali Abdur Raziq cenderung berbeda, khususnya mengenai bentuk negara dan pemerintahan yang ideal dan keharusan penegakan *Khilafah*, perbedaan tersebut terjadi salah satunya karena perbedaan zaman, perbedaan kondisi sosial politik serta intelektual kedua tokoh tersebut. Akan tetapi kedua konsep yang ditawarkan oleh kedua tokoh tersebut memiliki relevansi tersendiri terhadap konsep negara dan pemerintahan Indonesia. Sebagai contoh Indonesia menjunjung tinggi nilai nilai keadilan, dan tanggung jawab seorang pemimpin, yang sesuai dengan konsep Al-Mawardi. Indonesia juga menjunjung tinggi nilai nilai demokrasi, dan menghormati hak hak warga negara, hal ini sesuai dengan konsep yang di kemukakan Ali Abdul Raziq.